

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik berorientasi pada suatu kepentingan publik yang adil serta mencakup usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye dalam risnawan, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, dan alasan mengapa mereka melakukannya, serta hasil apa yang membuat kehidupan menjadi tampil berbeda. Sedangkan menurut Carl, kebijakan publik merupakan serangkaian perilaku yang bersumber dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan dengan hambatan dan juga keuntungan yang ada. Serta menurut David Easton, kebijakan publik adalah suatu pengaruh yang disebabkan oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (Risnawan, 2017).

Menurut Iskandar dalam Herdiana menyebutkan bahwa kebijakan dapat didefinisikan dalam suatu rangkaian dari sebuah program, kegiatan, perilaku, keputusan, dan juga sikap untuk melakukan tindakan ataupun tidak melakukan tindakan oleh para aktor kebijakan. Lebih lanjut lagi kebijakan dapat menyangkut beberapa hal seperti sesuatu yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, lain dari itu, juga berupa suatu peraturan pemerintah yang tertulis ataupun yang terkonvensi serta suatu wujud kerjasama dari badan legislatif dan juga badan eksekutif.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian program, tindakan, atau keputusan yang dilakukan atau dilakukan oleh para aktor kebijakan. Ini bisa berupa suatu keputusan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis (Dian Herdiana, 2018). Kebijakan publik disusun dengan alasan yang jelas, yakni bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Permasalahan yang muncul ditengah-tengah publik sangat beragam, dimulai dari bentuk, jenis dan juga tingkat keparahannya.

Namun perlu diketahui bahwa permasalahan tersebut tidak selalu berujung pada lahirnya kebijakan publik. Hanya isu-isu yang menarik perhatian dan juga mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki potensi besar menjadi suatu agenda kebijakan. Oleh karena itu, tahap perumusan masalah menjadi bagian yang paling krusial dalam proses perumusan kebijakan publik. Selain itu, penting pula untuk dipertimbangkan pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, menjalankan serta mengawasi juga mengevaluasi jalannya kebijakan tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Subianto, 2020) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses interaksi antara perumus tujuan dan apa tindakan yang digunakan untuk mencapainya. Inti dari pengimplementasian kebijakan terletak pada kemampuan dari lembaga pelaksana dalam menjalin hubungan sebab akibat yang efektif dari apa yang

ingin dicapai dengan metode atau langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mewujudkannya.

Namun pendapat tersebut dikritik oleh Jones karena tidak merumuskan dari maksud yang ada. Agar pelaksanaannya efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan juga dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, tindakan implementatif juga harus konsisten dan mendukung tujuan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Efektifitas dari implementasi juga sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola aktor yang terlibat dan mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Lahirnya suatu kebijakan perlu dijalankan agar dapat memberikan hasil ataupun tujuan yang diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin dalam (Akib & Tarigan, 2008), implementasi merujuk pada suatu rangkaian kegiatan yang terjadi setelah suatu undang-undang disahkan serta memberikan suatu wewenang terhadap program atau keluaran yang bersifat nyata. Istilah ini mencakup aktivitas yang berlangsung setelah tujuan dan juga hasil yang diharapkan dari suatu program dinyatakan oleh pejabat pemerintah.

Implementasi melibatkan tindakan maupun ketidaktindakan dari berbagai aktor yang ada untuk memastikan bahwa suatu program dapat dijalankan. Mereka juga menjelaskan bahwa implementasi tersusun dari berbagai macam aktivitas seperti lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk

menyediakan sumber daya, lalu menerjemahkan ketentuan hukum dalam bentuk konkret, lalu mengatur pelaksanaan dengan membentuk struktur birokrasi dan prosedur kerja serta lembaga pelaksana memberikan manfaat atau pembatasan kepada masyarakat sasaran yang nyata dari keluaran program tersebut.

Sementara itu, Menurut Grindle, implementasi adalah suatu proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada suatu tingkatan program tertentu. Suatu proses implementasi baru dapat dikatakan bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, serta program kegiatan telah tersusun dan anggaran dinyatakan siap disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. (Entjaurau et al., 2021) Grindle juga menyampaikan bahwa pada dasarnya implementasi bertujuan untuk membentuk keterkaitan yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan kebijakan sebagai hasil dari aktivitas pemerintahan. Dengan kata lain, implementasi memiliki peran dalam menciptakan suatu sistem penyaluran kebijakan, dimana berbagai instrumen dirancang dan juga dijalankan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam proses ini, kebijakan publik yang semula berupa pernyataan umum mengenai sebuah tujuan, sasaran, dan alat, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk program-program konkret. Program-program tersebut dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat dikelola secara langsung.

Menurut Grindle dalam (Sherly, 2017) terdapat dua indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Pertama, keberhasilannya dapat diukur dari proses tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih (*outcomes*). Pengukuran tersebut dilihat dari dua hal, yakni apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dan apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai. Kedua, Keberhasilan dari suatu implementasi publik juga ditentukan dari keterlaksanaan kebijakan yang terdiri dari isi kebijakan (*content of policy*), mencakup kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat, target yang ingin dicapai, bagaimana pengambilan keputusannya, pelaksana kebijakan serta sumber daya yang digunakan. Lalu terdiri dari lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup karakteristik dari lembaga serta rezim yang berkuasa, serta sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Kedua indikator tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Variabel isi kebijakan

1. Sejauh mana kepentingan kelompok termuat dalam isi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan yang memiliki berbagai macam kepentingan akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Namun pada indikator ini, dapat dipastikan bahwa suatu kebijakan pasti mencakup banyak kepentingan. Maka dari itu, sejauh mana berbagai macam kepentingan tersebut mempengaruhi implementasinya.

2. Jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif

Indikator ini menjelaskan bahwa pada suatu kebijakan yang dibuat, harus bisa menampilkan dampak positif yang dihasilkan setelah diimplementasikan.

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Maka dari itu, perubahan yang diinginkan haruslah memiliki skala yang akurat.

4. Apakah pengambilan keputusan dalam suatu program sudah tepat

Pengambilan keputusan memiliki peran yang penting dalam suatu kebijakan. Maka, harus dijelaskan apakah letak sebuah program sudah tepat.

5. Apakah sebuah kebijakan menyebutkan pelaksana kebijakannya dengan rinci

Suatu kebijakan harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan baik di bidangnya. Hal ini harus di transparansikan dengan baik, apakah suatu kebijakan mencantumkan implementatornya dengan baik.

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang baik agar terlaksana dengan optimal.

- a. Variabel Lingkungan Kebijakan

1. Karakteristik dari lembaga pelaksana

Lingkungan dari pelaksanaan kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Maka pada bagian ini, ingin dijelaskan mengenai karakteristik dari lembaga pelaksana yang turut mempengaruhi keberhasilannya.

2. Sejauh mana kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para aktor dalam implementasi kebijakan

Kekuasaan yang dimiliki para aktor dalam mengimplementasikan kebijakan sangatlah berpengaruh. Apakah aktor tersebut memiliki kepentingan lain atau berupaya dengan strategi yang dimilikinya..

3. Kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Kepatuhan dan juga respon dari para pelaksana ikut mempengaruhi keberhasilannya. Maka, sejauh mana kekuasaan

maupun kepatuhan dari para eksekutor dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kemudian Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan untaian tindakan yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang kemudian diberikan arahan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan sebelumnya.

Serangkaian tindakan ini mencakup upaya untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam bentuk operasional dalam jangka waktu tertentu serta dalam konteks pencapaian perubahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Penting untuk digarisbawahi bahwa suatu proses implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan dan alat alat kebijakan ditetapkan secara jelas melalui keputusan kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi baru dapat dilakukan setelah peraturan disahkan dan tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaannya.

Menurut Edwards III dalam Tiwa, implementasi kebijakan merupakan fase dalam proses pembuatan kebijakan yang berada diantara tahap perumusan kebijakan serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang terdampak. Terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi, beberapa faktor tersebut antara lain Komunikasi, apabila suatu proses implementasi berjalan secara efektif, pihak penanggung jawab pelaksana kebijakan harus memahami dengan jelas dari sesuatu yang perlu

dilakukan. Dalam tahapan pelaksanaannya, instruksi untuk melakukan kebijakan tersebut harus disampaikan kepada individu yang tepat serta harus secara jelas dan konsisten.

Lalu yang kedua adalah sumber daya, setiap kebijakan perlu ditunjang oleh ketersediaan dari sumber daya yang mencukupi, baik dari sumber daya manusia maupun anggaran. Sumber daya manusia mencakup jumlah dari pelaksana serta kualitasnya yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Dilain sisi, sumber daya anggaran sendiri mencakup kecukupan dana yang mampu mendukung pelaksanaan dari program ataupun kebijakan.

Kemudian disposisi, Sifat yang paling krusial yang dimiliki oleh implementor yakni komitmen yang kuat serta integritas yang tinggi. Seorang pelaksana yang memiliki komitmen serta kejujuran akan mampu dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam proses implementasi kebijakan. Yang terakhir ialah struktur birokrasi, hal ini mencakup dua elemen utama, yakni mekanisme dan susunan organisasi pelaksana. Mekanisme program umumnya telah diatur melalui prosedur operasional standar (SOP) yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan kebijakan. (Tiwa et al., 2023)

Model implementasi kebijakan milik Brian W. Hogwood dan Lewis Gunn, Model ini berasal dari pendekatan top-down, yaitu pendekatan implementasi kebijakan yang bermula dari perintah dari pemerintah pusat

atau otoritas dari pembuat kebijakan sampai ke tingkat lembaga pelaksana. Menurut Hogwood dan Gunn dalam (Munawir et al., 2019) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada sejauh mana lembaga pelaksana di bawah mampu menjalankan instruksi secara konsisten serta sesuai dengan rancangan awal.

Terdapat sepuluh prasyarat agar implementasi bisa berjalan dengan optimal. Yang pertama stabilitas eksternal, seperti lingkungan sosial politik atau ekonomi yang relatif tidak berubah drastis sehingga hal tersebut tidak mengganggu jalannya kebijakan. Kedua, ketersediaan waktu dan sumber daya. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan sudah pasti membutuhkan cukup waktu, anggaran tenaga kerja dan juga informasi. Ketiga, akses terhadap sumber daya.

Akses ini harus benar-benar bisa digunakan saat dibutuhkan. Keempat, hubungan kausal yang valid. Hal ini diharuskan memberikan kejelasan bahwa kebijakan akan menghasilkan *output* yang diinginkan. Kelima, Keterhubungan yang sederhana. Dalam menjalankan suatu kebijakan, semakin banyak tahapan dan juga aktor yang terlibat, maka akan semakin besar pula risiko ketidaksesuaian implementasi kebijakan. Keenam, minimnya ketergantungan. Implementasi kebijakan akan terlihat ideal apabila dalam pelaksanaannya tidak banyak bergantung pada banyak pihak dan juga faktor eksternal.

Ketujuh, kesepahaman terhadap tujuan. Seluruh elemen lembaga pelaksana harus memahami arah kebijakan agar mampu menghindari interpretasi yang berbeda. Kedelapan, merincikan tugas yang sistematis, dengan kata lain setiap langkah yang dibuat harus terdefinisi dengan baik serta memiliki urutan yang logis. Kesembilan, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, hal ini agar semua lembaga pelaksana bekerja dengan langkah yang selaras. Terakhir, adanya kekuasaan yang mampu mengawasi dan juga memastikan semua pelaksana mematuhi instruksi kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam (Subianto, 2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu realitas yang berlangsung setelah suatu program ditetapkan dan dirancang. Hal ini mencakup berbagai peristiwa ataupun aktivitas yang dilakukan setelah kebijakan publik disahkan, meliputi upaya administratif ataupun suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.

Keduanya menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dalam mengimplementasi kebijakan adalah dengan mengidentifikasi berbagai macam variabel yang memengaruhi tahapan pelaksanaan kebijakan. Variabel tersebut dibuat dalam tiga aspek utama. Pertama, sejauh mana permasalahan yang dihadapi dapat dikendalikan dengan mudah atau tidak. Seperti kesulitan teknis yang muncul, keragaman perilaku masyarakat yang

menjadi objek dari kebijakan, jumlah dari populasi dari kelompok sasaran, serta perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, sejauh mana kebijakan mampu mengarahkan jalannya proses implementasi. Hal tersebut bergantung pada kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai, ketepatan teori yang digunakan, ketepatan dari alokasi dana, serta koordinasi yang optimal antar lembaga pelaksana. Ketiga, sejauh mana faktor-faktor politik secara langsung memengaruhi keseimbangan dukungan terhadap tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle dikarenakan paling relevan dan juga lebih sederhana untuk menganalisis bagaimana Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Kedua aspek utama yang dikemukakan Grindle membantu peneliti untuk memahami mengenai substansi peraturan serta faktor pendukung dan juga penghambat dari pelaksanaannya di lapangan.

2.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan suatu produk dari peraturan perundang-undangan yang berada di tingkatan daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah, baik kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. Kewenangan ini dibentuk secara legalitas dan ditegaskan dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis hal ini diatur oleh perundang-undangan lainnya (Zarkasi, 2004).

Dalam jalannya pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemerintah di daerah diberikan kewenangan otonomi yang sebesar-besarnya, kecuali untuk urusan-urusan pemerintahan yang secara tegas ditetapkan untuk menjadi suatu kewenangan khusus milik pemerintah pusat oleh undang-undang. Untuk menjalankan otonomi yang sangat luas tersebut, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah serta regulasi lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan lainnya.

Peraturan daerah merupakan suatu wujud nyata dari pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini dikarenakan ada beberapa urusan daerah yang selain diatur oleh undang-undang, juga memerlukan peraturan lebih lanjut dan mengerucut melalui peraturan daerah. Untuk peraturan daerah sendiri, kewenangannya dilegalkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian lebih lanjut lagi tercantum dalam pasal 136 sampai pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang mana peraturan tersebut dibuat dalam rangka mengefektifkan suatu otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan juga Perda

Kabupaten dan Kota. Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Dalam menangani kemiskinan di Kota Tasikmalaya, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan pasal 2 angka 2, Perda ini dibuat semata-mata untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan penduduk miskin, memperkuat peran mereka dalam pengambilan kebijakan publik, menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup, memberikan rasa aman, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta menjamin koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa strategi dalam menanggulangi kemiskinan daerah kota yang tercantum dalam perda tersebut diawali dengan mendata penduduk miskin secara akurat, lalu melakukan pengurangan beban kelembagaan dan meningkatkan pendapatan kemampuan seperti pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

2.4 Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan lintas sektor yang menjadi penghambat dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga

pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan dengan terarah terstruktur, terpadu serta berkelanjutan. Menurut Nugroho dalam Oktavia dan Soelistyo, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mutlak ataupun relatif yang terjadi di suatu daerah, dimana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan mencerminkan suatu ketimpangan antara rendahnya daya beli dengan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. (Oktavia & Soelistyo, 2018) dan menurut Ummah, kemiskinan merupakan keadaan individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni untuk mencapai standar hidup rata-rata masyarakat yang berada di suatu wilayah. Selain itu, pendapatan yang rendah juga memiliki dampak pada terbatasnya terhadap akses pada layanan kesehatan dan juga pendidikan, yang mana hal tersebut merupakan hal penting dalam standar hidup manusia. Pada dasarnya, standar hidup tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, melainkan terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal yang layak. (Putri Anita Rahman, Firman, 2019)

Kemudian menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada ranah umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan individu maupun kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas hidup yang cukup dan

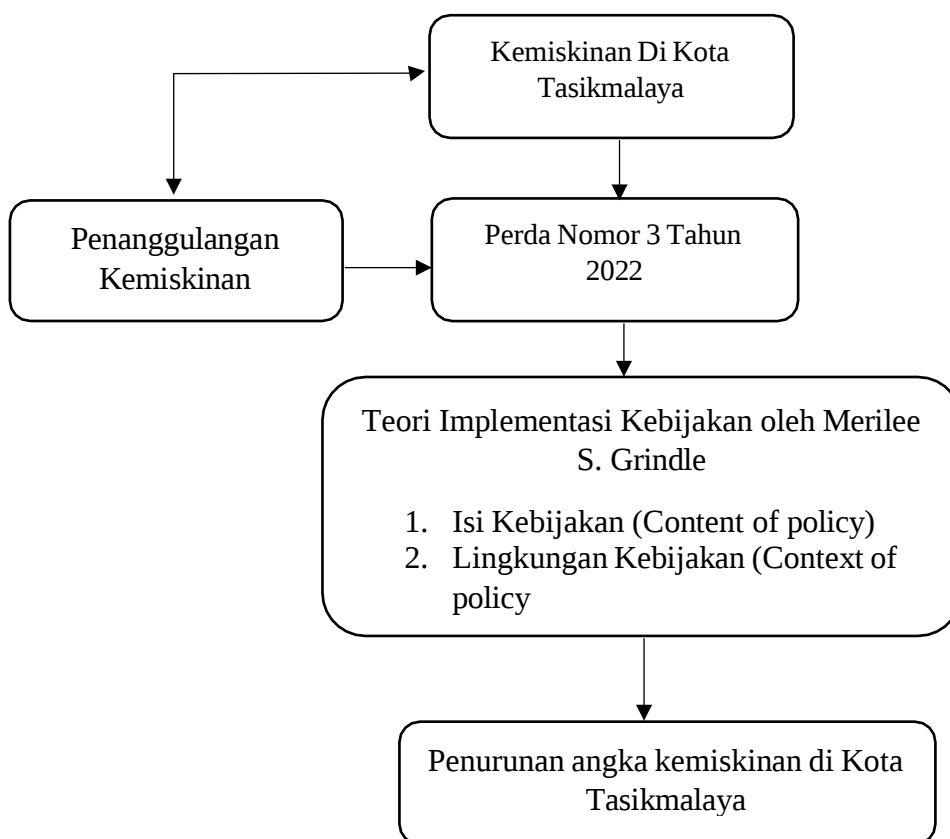
bisa disebut layak. Dalam pengertian yang luas ini, mencerminkan bahwa kemiskinan merupakan suatu persoalan yang bersifat multidimensi sehingga sulit untuk diukur secara sederhana dan juga membutuhkan kesepakatan dalam memilih mode pengukurannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang ataupun kelompok dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar baik secara absolut ataupun relatif, sesuai dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat. Dalam segi ekonomi, kemiskinan mencerminkan suatu ketimpangan antara daya beli yang rendah dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi termasuk dengan akses pangan, dan penunjang kehidupan lainnya.

Soemardjan dalam Tschudin menjelaskan bahwa ada berbagai cara mengukur kemiskinan dengan standar yang beragam, dengan berpegang pada dua kategori tingkat kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut, sesuatu dapat dikatakan kemiskinan absolut apabila tingkat pendapatan seseorang tidak mampu untuk menunjang kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan juga kesehatan. Lalu yang kedua adalah kemiskinan relatif, ini berkaitan dengan perhitungan yang didasarkan pada perbandingan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Dikatakan relatif karena kemiskinan ini dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan yang ada diantara kelompok sosial yang berbeda-beda didalam masyarakat (Tschudin, 2007).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, yang mana disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu dari banyaknya prioritas dalam setiap tahapan pembangunan periode lima tahunan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan dari masyarakat miskin dengan pertimbangan kemampuan daerah kota dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

2.5 Kerangka Penelitian



Penelitian ini dibangun atas dasar tingginya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya serta terjadinya penurunan angka kemiskinan dalam empat tahun terakhir. Dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tasikmalaya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Maka dari itu, akan dianalisis apakah implementasi dari perda tersebut menyebabkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan atau disebabkan oleh faktor lainnya. Analisis ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Merilee S. Grindle dengan dua indikator utama yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of policy*). Setelah itu, dapat ditemukan apa faktor yang berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.